

Soal Mafia Beras, Budi Waseso: Masa Negara Kalah?

Reporter: **Antara**

Editor: **Rr. Ariyani Yakti Widyastuti**

Minggu, 6 Mei 2018 07:27 WIB



Inspektur Jenderal (Irjen) Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina, saat meninjau Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Menurut Srie persediaan beras aman hingga usai lebaran nanti. Parliza Hendrawan

TEMPO.CO, Bantul - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso angkat bicara soal dugaan adanya sindikat penyimpangan dalam tata niaga [beras](#) selama ini. Ia mengatakan hal tersebut sekarang sedang dipetakan melalui Satuan Tugas (Satgas) pangan yang dibentuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Kita sedang petakan semua. Masa sih negara kalah sama mafia? Kan tidak boleh," kata Budi usai panen padi bersama Menteri BUMN di Bulak Jayan Desa Kebonagung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu sore, 5 Mei 2018.

Baca: [Mendag Minta Pedagang Beras Tak Ambil Untung Terlalu Besar](#)

Budi Waseso menilai masalah perberasan selama ini adalah masalah mendasar dari seluruh masyarakat Indonesia karena tingkat kebutuhan akan komoditas tersebut sangat tinggi. "Sehingga beras harus betul-betul bisa dikendalikan oleh negara, ketersediaannya, kestabilan harganya," katanya.

Oleh karena itu, menurut Budi, tata niaga perberasan khususnya antara petani dengan penjual itu seharusnya sama-sama diuntungkan. Begitu juga dari sisi pembeli, juga tidak rugi dengan harga beras yang tinggi. "Jadi harus sesuai dengan ketersediaan dari berasnya, harganya, juga terjamin kualitasnya," kata Budi Waseso.

Ke depan, kata Budi, pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan menggiatkan peningkatan kualitas produksi beras untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia. "Seperti yang hari ini kita lihat adalah beras berkualitas,"

Budi Waseso menjelaskan, dengan meningkatkan kualitas produksi beras di kalangan petani seluruh Tanah Air, maka akan menjadi sumber pemasukan atau ketahanan pangan bagi pemerintah Indonesia dari masalah beras. "Kalau perlu ke depan kalau kita sudah bangun dengan bibit yang bagus, pertanian yang bagus, dengan hasil yang maksimal, maka Indonesia seharusnya tidak perlu impor."

Adapun impor [beras](#), menurut Budi Waseso, hanya bisa dilakukan saat situasi paceklik dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya cukup besar. "Tapi kan kita bisa lakukan dengan swasembada dengan peningkatan kualitas pertanian khususnya beras," katanya.

ANTARA